

PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG CAMAT TERHADAP
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM INPRES BANTUAN
PEMBANGUNAN DESA

(Studi Pengawasan Langsung oleh Camat terhadap pelaksanaan Program
Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan
Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar)

S K R I P S I



Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S I)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh ;

Agus Dodik Sutrisno

NIM ; 930910201091

Pembimbing :

Drs. H. Hendro Muljono

Asisten Pembimbing

Drs. Sutomo, MSi.

Asel
Terima : 17. 8/5/01
No. Induk : 102 235801

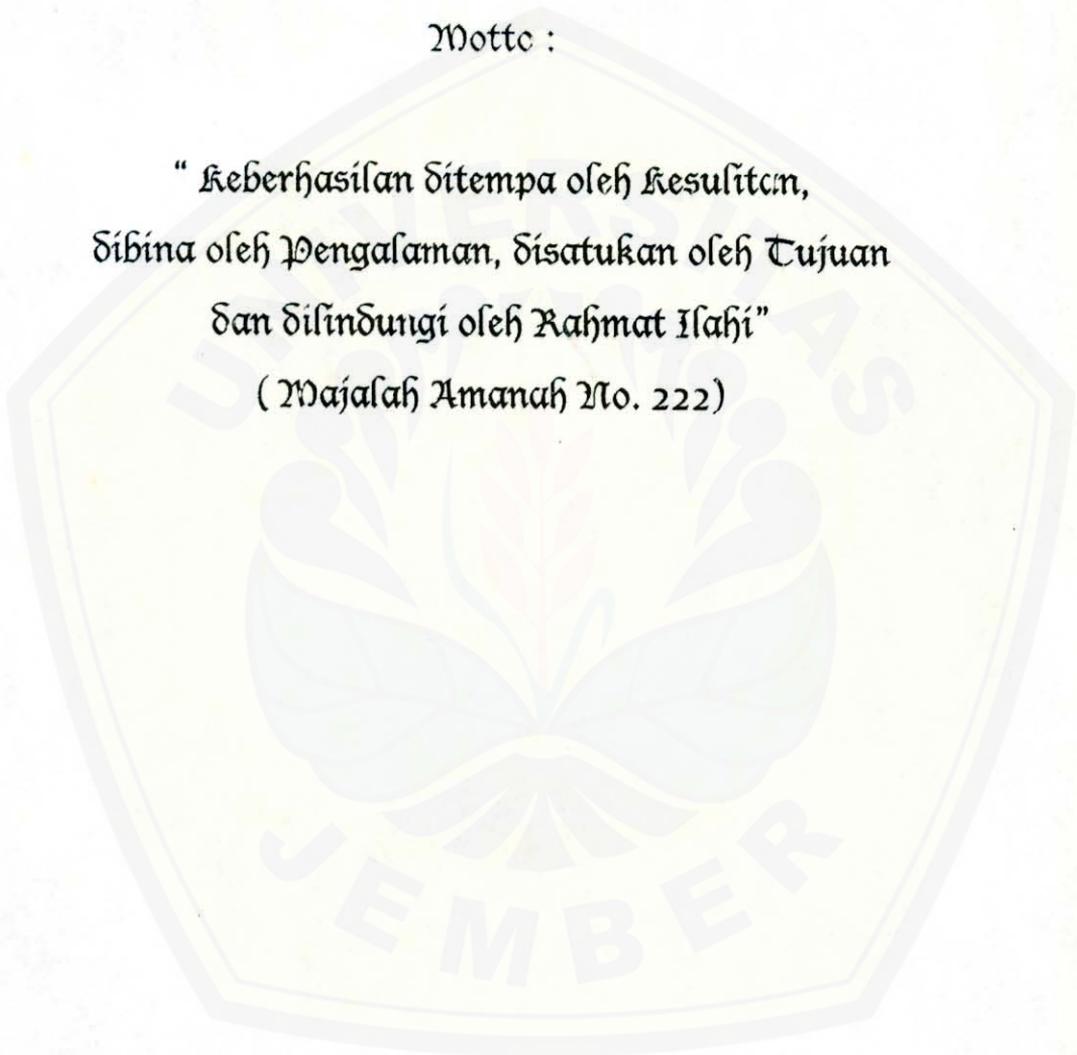
S
Klass
658.401 3
SUT
P
C.1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2001

Motto :

“ Keberhasilan ditempa oleh Kesulitan,
Dibina oleh Pengalaman, Disatukan oleh Tujuan
Dan Dilindungi oleh Rahmat Ilahi”
(Majalah Amanah No. 222)



Persembahkan

Alhamdulillah...., akhirnya perjuangan selama ini membuahkan hasil dan satu asa telah kugapai diantara rangkaian asa yang ada didepanku, semoga perjuangan ini menjadi permulaan yang baik bagi perjalananku selanjutnya. Tiada kata yang terucap dengan segala keikhlasan, kebahagiaan dan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

- ❖ Kedua orang tua Ayahanda Eddy Sutrisno dan Ibunda Katminatun yang telah melimpahkan kasih sayang, pengorbanan, doa serta perjuangan demi keberhasilan cita-cita Ananda
- ❖ Adikku Rini dan Dadang atas segala pengertian yang diberikan kepadaku, semoga kita akan berhasil dalam meraih cita-cita
- ❖ Seseorang yang terkasih yang akan menjadi bagian dari hidupku, yang selafu setia mendampingiku dalam mengarungi hidup ini
- ❖ Almamater tercinta.

PENGESAHAN

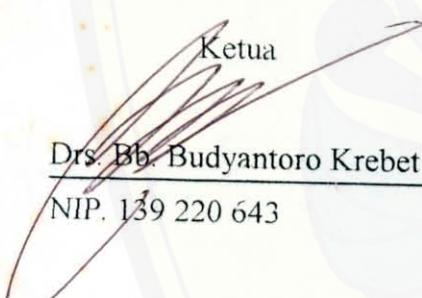
Telah diterima dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada

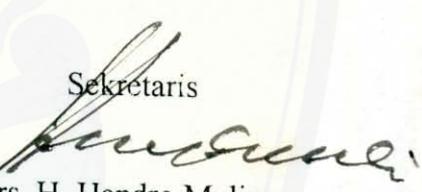
Hari : Senin
Tanggal : 12 Maret 2001
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


Drs. Bb. Budyantoro Krevet Ds, MS
NIP. 139 220 643

Sekretaris

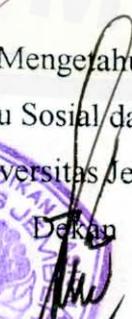

Drs. H. Hendro Muljono
NIP. 130 520 718

1. Drs. Bb. Krevet DS, MS
2. Drs. H. Hendro Muljono
3. Drs. A. Kholiq Ashari, Msi

Mengerahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832



KATA PENGANTAR

Puji syukur patut penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Pengawasan Langsung Camat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Namun bagaimanapun juga terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan dari berbagai pihak untuk menambah dan memantapkan materi tulisan ini. Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan ikhlas penulis ucapkan terima kasih kepada:

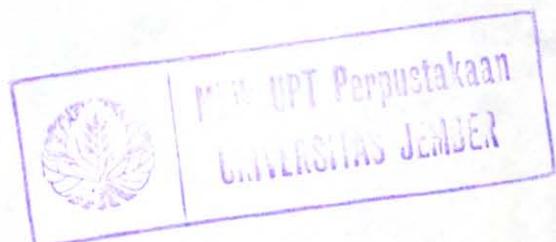
1. Bapak dan Ibu yang selalu memberi dorongan demi keberhasilan putra-putrinya
2. Bapak Drs. H. Hendro Muljono selaku Dosen Pembimbing yang begitu sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan skripsi ini
3. Bapak Drs. Sutomo, Msi, selaku Asisten Pembimbing yang begitu cermat dalam memberikan bimbingan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
6. Bapak Drs. Budijono, Msi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
7. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Wali yang begitu sabar memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa FISIP

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap unsur civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
9. Bapak Drs. Danuri, selaku Camat di wilayah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atas izin penelitian di wilayahnya
10. Adikku yang terkasih Imroatul Imamah atas segalanya
11. Teman-teman Kalimantan X/71 Pai, Cak SU, Ukik dan semuanya, trima kasih atas bantuannya.
12. Semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan yang telah mereka berikan. Akhirnya dengan menyadari fitrah manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis dengan senang hati menerima kritik yang positif demi sempurnanya karya tulis ini, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Jember, Februari 2001

Penulis



Daftar Tabel

Tabel I Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Inpres	10
Tabel II Daftar Kegiatan Pengawasan Langsung Camat	16
Tabel III Jumlah Populasi dan Sampel.....	31
Tabel IV Batas-Batas Desa.....	36
Tabel V Orbitasi Desa Sampel.....	37
Tabel VI Luas Wilayah Desa Menurut Peruntukan	37
Tabel VII Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	38
Tabel VIII Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	38
Tabel IX Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	39
Tabel X Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	39
Tabel XI Jumlah Sarana Peribadatan dan Pendidikan	40
Tabel XII Skor Jawaban Responden Terhadap Inspeksi Langsung.....	50
Tabel XIII Skor Responden Terhadap Pemeriksaan di Tempat.....	52
Tabel XIV Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel X	53
Tabel XV Jumlah Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel X	54
Tabel XVI Skor Jawaban Responden Terhadap Indikator Kualitas	55
Tabel XVII Skor Jawaban Responden Terhadap Indikator Kuantitas	56
Tabel XVIII Skor Jawaban Responden Terhadap Efektivitas Waktu.....	58
Tabel XIX Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Y	59
Tabel XX Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Y	60
Tabel XXI Klasifikasi Jawaban Responden Terhadap Variabel X dan Y	61
Tabel XXII Tabel Persiapan.....	64
Tabel XXIII Tabulasi Silang.....	66

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan Penelitian	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian	18
1.4. Konsepsi Dasar	18
1.4.1 Konsep Pengawasan Langsung (X)	19
1.4.1.1 Inspeksi Langsung (X1)	20
1.4.1.2 Pemeriksaan di Tempat (X2)	20
1.4.2 Konsep Efektifitas (Y)	21
1.4.2.1 Kualitas Pelaksanaan Program (Y1)	21
1.4.2.2 Kuantitas Pelaksanaan Program (Y2).....	22
1.4.2.3 Efektivitas Waktu (Y3)	22
1.4.3 Teori Penghubung Konsep Pengawasan Langsung Camat terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Inpres	22
1.5 Hipotesis	23
1.6 Definisi Operasional.....	24
1.6.1. Operasionalisasi variabel Pengaruh (X), Pengawasan Langsung Camat	25
1.6.1.1 Inspeksi Langsung (X1)	25
1.6.1.2 Pemeriksaan di Tempat (X2)	26

1.6.2. Operasionalisasi variabel Terpengaruh (Y), Efektifitas Pelaksanaan Program Inpres	27
1.6.2.1 Kualitas Pelaksanaan Program (Y1)	27
1.6.2.2 Kuantitas Pelaksanaan Program (Y2)	27
1.6.2.3 Efektivitas Waktu (Y3)	27
1.7. Metode Penelitian	29
1.7.1 Penentuan Populasi	29
1.7.2 Metode Penentuan Sampel	30
1.7.3 Metode Pengumpulan Data	31
1.7.3.1 Teknik Observasi	31
1.7.3.2 Teknik Dokumentasi	32
1.7.3.3 Teknik Kuesioner	32
1.7.3.4 Teknik Interview	32
1.7.4. Metode Analisis Data	32

BAB II : DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar	35
2.2 Keadaan Alam	35
2.3 Keadaan Penduduk	37
2.4 Sarana dan Prasarana Desa	40
2.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	41
2.5.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa	41
2.5.2 Bagan Strukur Organisasi LKMD	43
2.5.3 Tugas dan Fungsi LKMD	45
2.5.4 Mekanisme Perencanaan Dari Bawah	45

BAB III : PENYAJIAN DATA VARIABEL - VARIABEL

3.1. Pengantar	48
3.2. Penyajian Data Variabel Pengaruh (X), yaitu Pengawasan Langsung Camat	48
3.2.1 Inspeksi Langsung (X1)	49
3.2.2 Pemeriksaan di Tempat (X2)	50

3.3 Penyajian Data Variabel Terpengaruh (Y), yaitu Efektifitas Pelaksanaan Program Inpres	54
3.3.1 Kualitas Pelaksanaan Program (Y1)	54
3.3.2 Kuantitas Pelaksanaan Program (Y2)	55
3.3.3 Efektivitas Waktu (Y3).....	57

BAB IV : ANALISIS DAN INTREPRESTASI DATA

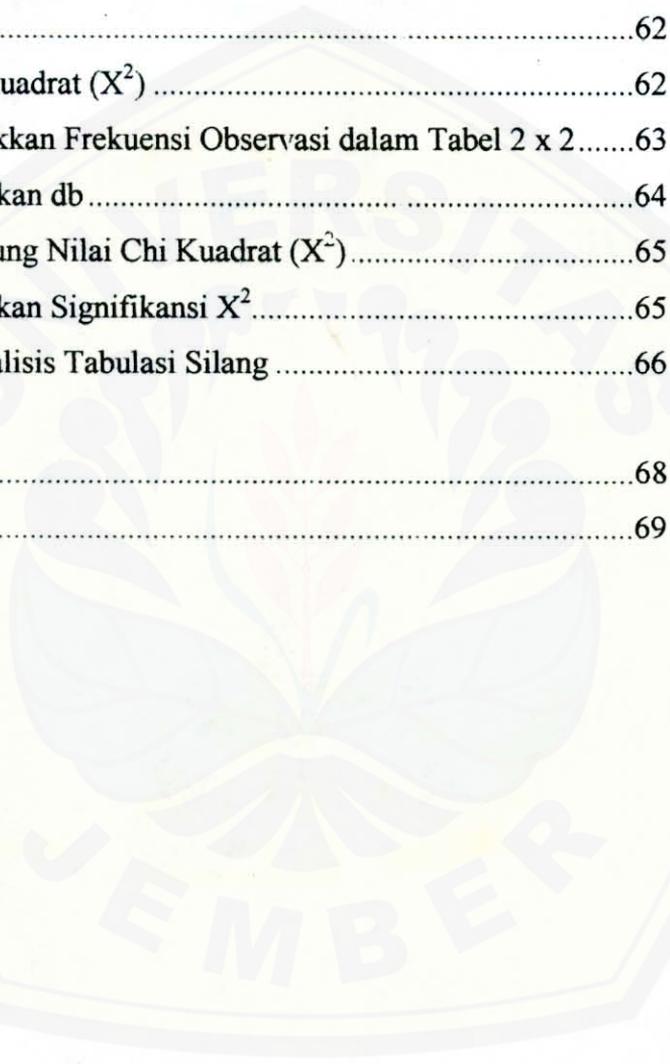
4.1 Pengantar	62
4.2 Analisis Chi Kuadrat (X^2)	62
4.2.1 Memasukkan Frekuensi Observasi dalam Tabel 2 x 2.....	63
4.2.2 Menentukan db	64
4.2.3 Menghitung Nilai Chi Kuadrat (X^2).....	65
4.2.4 Menentukan Signifikansi X^2	65
4.3 Penerapan Analisis Tabulasi Silang	66

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila merupakan kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut dapat tercapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dengan segala hasilnya, maka pemerintah telah mengambil inisiatif untuk terus meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah-daerah yang diwujudkan dalam program pembangunan secara terus menerus dan menjadikan daerah pedesaan sebagai perhatian utama pembangunan nasional. Tekad tersebut tercermin dalam GBHN dengan TAP MPR No. II Tahun 1988 yakni :

"Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa, memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan dan lain-lain"(1988: 135).

Perhatian pemerintah pada pedesaan sangat tepat karena suatu kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan, sebagaimana Kontjoroningrat mengatakan bahwa:

"Dalam pembangunan nasional dewasa ini titik berat pembangunan dimulai dari pedesaan, mengingat tujuan pembangunan itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, sedangkan lebih dari 80% penduduk di Indonesia berdomisili di pedesaan"(1985 : 43).

Kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan aparat (pemerintah) dan kesadaran partisipasi masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam GBHN yaitu :

"Pembangunan nasional dilaksanakan bersama antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan

pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang"(1993 : 204).

Berdasar penjelasan diatas dinyatakan bahwa pembangunan harus dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu tugas penting pemerintah adalah pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat menurut pendapat Kurnarjo dibiayai oleh :

- a. Pemerintah Pusat (APBN) sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas perbantuan.

Lebih lanjut pembangunan ini dapat dibagi tiga kelompok :

1. Pembangunan yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, yaitu pembangunan yang dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD). Perencanaan, prioritas proyek dan kebijaksanaan dilaksanakan oleh daerah. Pelaksanaan proyek dilakukan oleh Dinas Daerah.
2. Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat tetapi pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, misalnya proyek yang dibiayai oleh dana Inpres. Dana Inpres ini sifatnya merupakan bantuan kepada daerah untuk menunjang penyelenggaraan urusan yang sudah diserahkan kepada daerah.
3. Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat tetapi alokasinya berada di daerah, misalnya proyek yang dibiayai oleh APBN yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Departemen.(1993: 140)

Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat tetapi pelaksanaannya diserahkan pada Pemerintah Daerah adalah proyek yang dikenal dengan proyek Inpres. Proyek Inpres tersebut terdiri dari :

- a. Inpres Bantuan Pembangunan Desa
- b. Inpres Bantuan Pembangunan Dati II
- c. Inpres Bantuan Pembangunan Dati I
- d. Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar
- e. Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan

- f. Inpres Bantuan Pembangunan Reboisasi
- g. Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pasar
- h. Inpres Bantuan Pembangunan Peningkatan Jalan Propinsi
- i. Inpres Bantuan Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten
- j. Inpres Desa Tertinggal

Dari berbagai macam program pembangunan diatas terlihat bahwa pemerintah mulai banyak mengambil inisiatif untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah-daerah yang diwujudkan dengan program-program pembangunan secara terus menerus dan menjadikan daerah pedesaan sebagai perhatian utama dari pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan bagian penting dari usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh dan harus dibina secara terus-menerus dan sistimatis, telah dijelaskan dalam Pola Gerak Operasional Pembanguinan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 1982 sebagai berikut :

"Pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus secara sistimatis dan terarah sebagai bagian yang penting dari usaha pembangunan nasional yang menyeluruh"(1982 : 73).

Pembangunan desa merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang berkaitan. Adapun pelaksanaan mendapat bantuan pembinaan penanganan utama dari pemerintah tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat. Kesungguhan pemerintah dalam menangani pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai program yang dimulai Pelita I dan semakin meningkat pada Pelita-Pelita berikutnya. Adapun program-program pemerintah dalam pembangunan desa antara lain :

- a. Program Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Penduduk
- b. Perbaikan Gizi, Kesehatan dan Lingkungan
- c. Peningkatan produksi pertanian melalui pengadaan kredit dan pupuk pestisida
- d. Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa
- e. Pembinaan Keluarga Sejahtera
- f. Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT)

g. Inpres Desa Tertinggal (IDT)

h. Dan lain-lain.

Selanjutnya penulis lebih tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa. Program ini selain memiliki nilai kelestarian pembangunan karena sifatnya yang rutin juga melibatkan LKMD dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat desa.

Sesuai dengan pernyataan diatas Kunaryo mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Inpres Bantuan Pembangunan Desa merupakan bantuan Pemerintah Pusat yang diberikan pada setiap desa dan kelurahan dan bertujuan sebagai sarana, stimulan atau perangsang untuk mendorong, menggerakkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam membangun desa atau kelurahan (1993:163)".

Tujuan dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa ini tercermin dalam ketentuan Intruksi MENDAGRI No 26 Tahun 1984 yaitu :

1. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong serta menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat dalam membangun desanya.
2. Mendorong berfungsinya lembaga-lembaga yang ada di desa seperti : LKMD, LMD, PKK, KUD, Koperasi Serba Usaha dan lembaga-lembaga lainnya.
3. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi desa di pedesaan kearah kehidupan berkopersasi dalam rangka meningkatkan pendapatan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan melalui latihan ketrampilan agar mampu memproduksi dan memasarkan hasil produksinya sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja di desa.
5. Mempercepat proses kemandirian desa dengan melaksanakan secara intensif kegiatan pelatihan, pengembangan usaha produktif dan penataan desa.
6. Membantu prasarana fisik di pedesaan dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian, kelancaran transportasi, pemasaran hasil produksi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa"(1993:12).

Desa yang mendapat bantuan pembangunan adalah desa-desa yang jumlahnya ditetapkan oleh Keputusan MENDAGRI tentang data wilayah administratif pemerintahan desa dan kelurahan yang diterbitkan setiap tahun anggaran. Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa merupakan bantuan langsung kepada masyarakat desa yang dikelola melalui wadah Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Prosedur pengelolaan bantuan pembangunan desa menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan penyusunan rencana penggunaan bantuan pembangunan desa dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan bersama-sama LKMD dalam rapat LMD yang hasilnya dituangkan dalam keputusan desa atau kelurahan sebagai dasar Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP).
2. Penyusunan DURP dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan dibantu oleh pelaksana personalia proyek.
3. Persiapan dan penyusunan rencana penggunaan bantuan untuk kegiatan PKK dilakukan oleh ketua seksi PKK-LKMD bersama-sama tim penggerak PKK untuk dibahas dalam musyawarah PKK yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Musyawarah PKK sebagai dasar penyusunan DURP.
4. Penyusunan DURP dilakukan oleh ketua seksi PKK-LKMD dengan bantuan personalia pelaksana proyek.
5. DURP yang telah selesai disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepala desa atau kepala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa LKMD sangat berperan dalam penyusunan DURP bersama-sama kepala desa dan ketua pelaksanaprojek yang selanjutnya dibahas dalam rapat LMD dan hasilnya dituangkan dalam keputusan desa sebagai dasar penyusunan DURP, membantu Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melakukan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong. Untuk selanjutnya tepat bila LKMD ditunjuk sebagai instrumen Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dengan berdasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1984, yakni :

“Masyarakat desa yang diorganisasikan dalam wadah LKMD berkewajiban dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, kemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan proyek-proyek pembangunan desa termasuk proyek-proyek PKK” (Depdagri 1993:19).

Selanjutnya penyaluran dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Setelah pengesahan DURP oleh Bupati/Wali Kota Madya Dati II menyerahkan DURP yang dimaksud kepada para Kepala Desa.
2. Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui Kantor Cabang BRI/BRI Unit Desa dengan sistem rekening giro atas nama Kepala Desa/Kelurahan penerima bantuan.
3. Bantuan diharapkan setelah DURP yang merupakan lampiran anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (RAPPKD)/ pengelolaan keuangan desa/kelurahan diserahkan oleh Bupati/Wali Kota Madya. Pengesahan DURP bantuan pembangunan desa dimaksud tidak harus menunggu DURP desa/kelurahan divilayahnya terkumpul seluruhnya.
4. DURP yang telah disahkan merupakan perintah penyaluran dana kepada Cabang BRI untuk memindahbukukan dan bantuan kerekening giro kepala desa/ kelurahan penerima bantuan, dengan demikian bantuan sudah siap dicairkan. Pada saat pencairan dana pembangunan desa tidak dibenarkan dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi saat itu.(1993: 26).

DURP yang telah disahkan Bupati/ Wali Kota Madya dapat dipakai untuk menyalurkan dana pada Kepala Desa/Kelurahan penerima bantuan. Dalam buku petunjuk pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa disebutkan pula bahwa :

“Seluruh penyaluran dana dilaksanakan oleh BRI ke masing-masing desa/ kelurahan melalui rekening giro, penyampaian rekening giro tersebut dilakukan pada saat rapat tentang pengarahan bantuan pembangunan desa di tingkat Kecamatan” (1993: 11).

Sesuai dengan musyawarah LKMD dan telah ditetapkan melalui keputusan desa tentang anggaran desa, bantuan langsung pada masyarakat sebesar yang telah ditentukan dengan beberapa sasaran penggunaan. Adapun Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1997/1998 masing-masing desa mendapat bantuan sebesar Rp 6.500.000,-. Sedang perincian penggunaan dana tersebut yang tertuang dalam DURP Penunjang sebagaimana terlampir yaitu:

Lampiran DURP I	: Kegiatan Ekonomi Produktif	Rp 1.950.000,-
Lampiran DURP II	: Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa	Rp 2.325.000,-
Lampiran DURP III	: Kegiatan Penguatan Kelembagaan	Rp 725.000,-
Lampiran DURP IV	: Kegiatan PKK serta Pembinaan anak dan Remaja	<u>Rp 1.500.000,-</u>
		Rp 6.500.000,-

Bantuan tersebut diharapkan mendapat tambahan dari swadaya masyarakat dan dikelola oleh masyarakat melalui wadah LKMD secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan pengelolaannya sebagai berikut :

1. Kepala Desa/ Kelurahan : Penanggungjawab dan Pengendali
2. Ketua I LKMD : Penanggungjawab Pembangunan
3. Ketua II LKMD/Tim Penggerak PKK
Desa atau Kelurahan : Ketua Pelaksana
4. Bendahara LKMD : Bendaharawan

Selanjutnya DURP yang telah disahkan sebagai dasar Bank penyalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening Giro Ketua I LKMD bersama dengan bendaharawan LKMD.

Keberhasilan pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, partisipasi masyarakat yang dihimpun dalam wadah LKMD mutlak diperlukan. Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan berhasil apabila menimbulkan efek atau akibat yang diinginkan. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut H.Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat adalah Sebagai berikut :

“Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, jadi jelas bila sasaran yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya berarti efektif” (1988: 16).

The Liang Gie mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung arti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan kegiatan dengan tujuan yang memang dikehendaki, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan suatu akibat atau maksud sebagaimana yang dikehendaki”(1985: 87).

Tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugas sering diartikan sebagai target, yang dalam pengertian ini meliputi kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana rumusan tentang efektivitas yang dikemukakan oleh Hidayat :

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya” (1986: 187).

Pada dasarnya semua kegiatan selalu berusaha untuk mencapai efektivitas, demikian juga dengan pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa diharapkan tercapai secara efektif. Untuk mempermudah pengukuran terhadap pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa maka dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pembangunan fisik.

Dengan melihat karakteristik maupun tipologi desa di wilayah Kecamatan Udanawu secara umum terdiri dari desa swakarsa desa swadaya dan desa swasembada, maka penulis mengadakan penelitian pada enam desa yaitu dua desa swakarsa (Karanggondang dan Slemanan), dua desa swadaya (Sukorejo dan Sumbersari) dan dua desa Swasembada (Ringinanom dan Mangunan).

Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanamu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar dalam bentuk fisik meliputi :

1. Kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekaligus dapat menambah penghasilan masyarakat. Kegiatan ini berbentuk; pembibitan rambutan, pembibitan mangga, pembibitan mlinjo dan durian.
2. Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana desa yang bertujuan untuk melancarkan irigasi dan mengairi sawah. Kegiatan ini berbentuk; pembangunan bendungan pengatur air (BPA), pembangunan plengsengan, pembangunan jembatan dan pembuatan saluran.

3. Kegiatan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa. Kegiatan ini berbentuk ; jambanisasi dan pengadaan genteng kaca.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar dapat dilihat pada rekapitulasi daftar usulan rencana proyek dan realisasi pelaksanaan program seperti dalam tabel 1 berikut ini :



Tabel I
Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa
di wilayah Kecamatan Udanawu Kabupaten Bitar Tahun Anggaran 1997/1998

Lokasi Proyek	Nama Proyek	Biaya (ribuan)			Waktu (hari)		Hasil		Rata-rata				
		Bantuan Inpres	Target Swadaya Masyarakat	Realisasi Swadaya Masyarakat	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ringin Anom	Bibit rambutan	200	200	150	75	30	30	30	100	400 btg	350 btg	87	
	Pembangunan BPA	2.675	2.000	1.750	87	60	70	86		5 x 15 m	5 x 15 m	100	
	10 Prog. PKK genteng kaca	300	300	200	67	30	40	75		300 buah	250 buah	83	
Mangunan	Bibit mangga	200	200	100	50	30	40	75		400 btg	300 btg	75	
	Pembuatan plengsengan	2.675	2.000	1.500	75	60	70	86		2x200 m	2x150 m	75	
Sukorejo	Bibit rambutan	200	200	150	75	30	40	75		400 btg	350 btg	87	
	Pembuatan jembatan	3.075	2000	1.500	75	60	75	80		6x12 m	6x10 m	83	
	10 Program PKK jambanisasi	500	200	200	100	30	45	67		7 buah	7 buah	100	
Sumber Sari	Bibit mangga	200	200	200	100	30	30	100		400 btg	400 btg	100	
	Pembuatan saluran	2.850	2.500	1.750	70	60	75	80		0.5x200m	0.5x175 m	87	
Karangondang	Bibit melinjo	200	200	100	50	30	30	100		400 btg	300 btg	75	
	Pembangunan plengsengan	2.675	2000	1.400	70	60	70	86		1 x 200 m	1 x 160 m	80	
	10 Program PKK jambanisasi	500	200	125	62	30	30	100		7 buah	5 buah	71	
Sleman	Bibit durian	200	200	100	50	30	30	100		400 btg	300 btg	75	
	Pembangunan jembatan	3.200	2.000	1000	50	60	65	92		4 x 8 m	4 x 8 m	100	
Rata-rata					71				87			85%	

Realisasi : $X 100 = \dots\%$

Target :

0% - 40% = rendah
 41% - 75% = sedang
 76% - 100% = tinggi

Realisasi : $X 100 = \dots\%$

Tabel I menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar dapat dikategorikan cukup tinggi yaitu 81%, tetapi masih belum terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% sehingga terdapat selisih 19%. Keadaan ini disebabkan antara lain karena dana pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat belum bisa terkumpul secara keseluruhan seperti perencanaan semula, sumber dana proyek masih mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat. Dana pembangunan fisik desa dari swadaya masyarakat yang tidak terkumpul secara keseluruhan menunjukkan masih kurang sadarnya masyarakat terhadap arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan, juga karena mekanisme tata cara pengumpulan dana yang dilakukan oleh LKMD masih bersifat sederhana yaitu masih menunggu hasil pertanian masyarakat desa. Disamping itu ketidakefektifan juga dinilai dari keterlambatan waktu penyelesaian masing-masing proyek.

Berdasar penelitian yang penulis lakukan, keberadaan LKMD sebagai wadah masyarakat sangat berperan dalam pengelolaan baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan serta menggerakkan swadaya masyarakat untuk menyumbangkan uang, tenaga dan material yang berguna bagi pembangunan fisik desa ternyata belum dapat berfungsi secara optimal. Agar LKMD ini bisa lebih berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka perlu adanya koordinasi yang baik dengan petugas lapangan (PL) dan adanya pengawasan yang cukup dari pimpinan (Camat).

Keberhasilan pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ; dana yang cukup, perencanaan yang baik, koordinasi yang baik dengan petugas lapangan (LP) serta pengawasan yang cukup dari pimpinan (Camat).

Namun agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis lebih menekankan pada faktor **pengawasan**, karena faktor pengawasan mutlak diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. Pengawasan merupakan tahap akhir dari proses manajemen yang sangat efektif untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan atau sasaran yang tercapai dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan dan seorang pimpinan harus melakukannya karena tidak bisa didelegasikan sepenuhnya kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejamto sebagai berikut :

"Fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi-fungsi lain selain fungsi pengawasan secara teoritis dapat dapat didelegasikan sepenuhnya kepada bawahan sehingga pimpinan tinggal mengawasi saja pelaksanaannya. Tetapi fungsi pengawasan tidak demikian, meskipun pimpinan telah dibantu oleh suatu aparat yang tugasnya khusus menangani pengawasan, pimpinan tetap melakukan sendiri pengawasan terhadap tugas anak buahnya"(1987 : 17).

Demikian halnya dengan pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu harus mendapat pengawasan dari Camat. Camat sebagai kepala wilayah berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap semua program bantuan desa dan membina partisipasi, usaha gotong-royong masyarakat dalam wadah LKMD. (Depdagri, 1984:19)

Berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab Camat sebagai kepala wilayah maupun Penguasa Tunggal di wilayahnya Bayu Suryaningrat mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Camat adalah penguasa tunggal diwilayahnya, berkewajiban untuk mengawasi, membimbing dan membina kegiatan pemerintahan maupun pembangunan desa menuju swasembada dan desa Pancasila" (1985 : 17).

Kewajiban dan tanggung jawab Camat sebagai Kepala Wilayah terhadap Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpres Nomor : 481.3/1568/SJ/1998 adalah sebagai berikut :

1. Camat memberikan bimbingan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan bantuan pembangunan desa kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

2. Meneliti dan mengelola DURP dari desa atau kelurahan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota Daerah Tingkat II untuk mendapat pengesahan lewat Kepala Kantor Pembangunan Desa.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa melalui tertib perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.
4. Memonitor atau mengevaluasi perkembangan pelaksanaan proyek sebagai dasar untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan proyek bantuan pembangunan desa serta pelaksanaan fisik yang telah selesai 100% kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan.

Selanjutnya Drs. H. Siagian, MPd berpendapat bahwa :

"Pada tingkat Kecamatan, Camat memadukan keseluruhan kegiatan Program Pemerintah dalam Pembangunan Desa dengan partisipasi masyarakat, Camat menyelenggarakan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, agar program-program pemerintah benar-benar mencapai sasarannya" (1989:19).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Camat sebagai Kepala Wilayah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa. Camat memberikan bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta menilai dan mengolah DURP yang akan disampaikan kepada Bupati. Demikian juga Camat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa, serta menumbuhkan usaha gotong-royong/swadaya masyarakat desa dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) agar tujuan atau sasaran yang tercapai sesuai dengan rencana serta target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mencegah maupun mengatasi terjadinya penyimpangan pelaksanaan program dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya maka pengawasan mutlak diperlukan. Dengan pengawasan dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan secepat mungkin pimpinan (Camat) dapat segera mengambil tindakan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling sesuai untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebelumnya. Seperti diungkapkan oleh Sondang P. Siagian yaitu :

"Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang sedang dilakukan untuk menjamin supaya kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana" (1986 : 11).

Dengan pengawasan akan diketahui apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dan selanjutnya dapat segera dicari jalan keluarnya. Selanjutnya Soekarno K mengungkapkan bahwa :

"Pengawasan atau pengendalian adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan" (1985:105).

Berdasar beberapa pendapat diatas bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan untuk menjamin pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Rencana yang dimaksud target yaitu realisasi pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa 100%.

Dalam menjalankan aktivitas pengawasan seorang pimpinan (Camat) dapat menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi pekerjaan. Menurut Sondang P. Siagian ada dua metode yaitu :

1. Pengawasan Langsung (Direct Control)
2. Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control)

Yang dimaksud pengawasan langsung dan tidak langsung menurut Sondang P. Siagian adalah :

"Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek yang diawasi, pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung, pemeriksaan di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan jarak jauh, yaitu melalui laporan yang berbentuk tulisan atau lisan"(1989:139).

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada pengawasan langsung, karena dinilai lebih efektif mengingat jarak antara subyek dan obyek dekat sehingga pengawas (Camat) dapat melihat, menghayati dan menilai sendiri pelaksanaan program Inpres tersebut. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpres Nomor : 481.3/1568/SJ/1998 pelaksanaan pengawasan dilaksanakan satu

bulan sekali. Adapun realisasi pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat terhadap pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel II di bawah ini :



Tabel II
Daftar kegiatan Pengawasan Langsung Camat
di wilayah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Waktu	Desa yang diawasi							Target	Realisasi	Prosentase Rata-rata
	Ringinanom	Mangunan	Sukorejo	Sumbersari	Karanggondang	Slemanan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
April	1	1	1	1	1	-	1	6	5	83%
Mei	1	1	1	1	1	1	-	6	5	83%
Juni	-	1	1	1	-	1	1	6	4	67%
Juli	1	1	-	1	1	1	1	6	5	83%
Agustus	1	1	1	1	1	1	-	6	5	83%
September	1	-	1	1	1	1	1	6	5	83%
Oktober	-	1	1	-	1	1	1	6	4	67%
November	1	1	1	1	1	-	1	6	5	83%
Desember	1	-	1	1	1	1	1	6	5	83%
Januari	1	1	-	1	1	1	-	6	4	67%
Februari	1	1	1	1	-	1	1	6	4	67%
Maret	1	-	1	-	1	1	1	6	4	67%
Sumber : Bangdes Tahun 1997/1998										
Keterangan :										
Pengawasan dilakukan 1 bulan sekali										
$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \dots\%$										

Kriteria :

- 0% - 40% = rendah
- 41% - 75% = sedang
- 76% - 100% = tinggi (Pedoman Waskat, CV Kloeng Kloede Jaya)

Berdasar tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dapat dikategorikan cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 78%, namun perlu ditingkatkan karena masih terdapat selisih 22% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Keadaan seperti ini harus segera diatasi, karena apabila dibiarkan berlarut selisihnya akan bertambah besar dan sangat mengganggu tercapainya efektifitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

Dengan berdasar berbagai keterangan diatas maka cukup kiranya penulisan skripsi ini mengambil judul :

" PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG CAMAT TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DESA". (Studi pengawasan Camat terhadap pelaksanaan proyek fisik Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar).

1.2 Perumusan masalah

Pada hakekatnya perumusan masalah mempunyai tujuan menyederhanakan suatu penelitian, merumuskan dan akhirnya menjadikan sebagai landasan dalam pembahasan untuk mencari pemecahannya. Lebih lanjut A.A Loedin mengemukakan agar permasalahan mempunyai arti yang jelas maka masalah tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Menampilkan dua variabel atau lebih
2. Persoalan harus ditegaskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dituangkan dalam kalimat tanya
3. Persoalan harus memungkinkan pengukuran secara empiris

Berdasar uraian tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

"Apakah ada pengaruh antara Pengawasan Langsung Camat dengan Efektifitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa?".

1.4.1 Konsep pengawasan langsung (X)

Suatu kegiatan untuk mendapat hasil yang lebih baik selalu memerlukan perencanaan. Suatu perencanaan akan berjalan dengan baik apabila diikuti dengan beberapa tindakan, salah satu tindakan tersebut adalah pengawasan. Tanpa adanya pengawasan kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan.

Demikian halnya dengan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana maka aspek pengawasan mutlak diperlukan. Pelaksanaan program Inpres ini mendapat pengawasan dari Camat sebagai Kepala Wilayah. Dalam pelaksanaan pengawasan ini diperlukan teknik atau metode.

Berkenaan dengan teknik atau metode pengawasan menurut Sondang P. Siagian dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung yang maksudnya adalah sebagai berikut :

"Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek yang diawasi, pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung, observasi di tempat (on the spot report). Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan jarak jauh, yaitu melalui laporan yang berbentuk tulisan atau lisan"(1989:139).

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai salah satu teknik pengawasan yang dijadikan konsep yaitu pengawasan langsung, karena dinilai lebih efektif mengingat jarak antara subyek dan obyek lebih dekat.

Sehubungan dengan Pengawasan langsung Soejanto mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek yang diawasi. Dan pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung, pemeriksaan di tempat"(1987:41).

Berdasarkan konsep pengawasan langsung yang dipakai dalam penelitian ini, maka dapat ditarik indikator-indikator sebagai berikut :

1. Inspeksi Langsung (X1)
2. Pemeriksaan Di Tempat (X2)

1.4.1.1 Inspeksi Langsung (X1)

Tujuan dari pengawasan telah disebutkan di atas adalah untuk mencegah maupun mengatasi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang sering dilakukan bawahan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu seorang pimpinan perlu melakukan pengawasan untuk mengetahui kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Dengan mengetahui kondisi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan maka pimpinan dapat memberikan masukan, petunjuk-petunjuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bawahan dalam melaksanakan tugasnya.

Berhubungan dengan ini Soejamto mengemukakan definisi tentang inspeksi langsung yaitu :

"Inspeksi langsung tindakan kegiatan manager atau pimpinan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan di tempat (on the spot), dimana bila perlu memberikan petunjuk-petunjuk pada pelaksana dan juga mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar pekerjaan berjalan dan memperoleh hasil sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan"(1996:167).

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inspeksi langsung mengandung kegiatan yaitu mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan, memberi petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

1.4.1.2 Pemeriksaan di Tempat (X2)

Pemeriksaan di tempat merupakan bentuk pengawasan langsung, dimana menurut Soejamto adalah sebagai berikut :

"Pemeriksaan di tempat adalah salah satu cara atau bentuk teknik pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara mengamati, menyelidiki atau mempelajari secara cermat dan sistematis serta menilai dan menguji kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan dan segala dokumen atau keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan menerangkan hasilnya dalam berita acara pemeriksaan(BAP)"(1996:173).

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan di tempat mengandung kegiatan yaitu mengamati dan menyelidiki secara cermat dan sistematis pelaksanaan pekerjaan, menguji dan menilai kebenaran pelaksanaan pekerjaan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang pelaksanaan pekerjaan.

1.4.2 Efektifitas Pelaksanaan Program (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terpengaruh adalah efektivitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Seperti pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat mengemukakan konsep efektivitas sebagai berikut :

"Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, jadi jelas bila sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya berarti efektif"(1988:16).

Tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugas sering diartikan sebagai target yang dalam pengertian ini meliputi kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana dirumuskan oleh Hidayat sebagai berikut :

"Efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya"(1986: 187).

Konsep yang dikemukakan oleh Hidayat tersebut mendasari penulis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kualitas Pelaksanaan Program (Y1)
2. Kuantitas Pelaksanaan Program (Y2)
3. Efektivitas Waktu (Y3)

1.4.2.1 Kualitas Pelaksanaan Program (Y1)

Kualitas menurut Wilson dan Heyel adalah : "Hal-hal yang menunjukkan bagaimana sebaiknya ia melakukan apa yang harus dikerjakan, ketepatan kelengkapan dan kerapian"(1987: 101). Kualitas pelaksanaan program lebih mengacu pada mutu kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang ditandai

dengan ketepatan, kelengkapan dan kerapian kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari ketelitian dan ketepatan dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas dan waktu yang telah ditentukan.

1.4.2.2 Kuantitas Pelaksanaan Program (Y2)

Menurut Wilson dan Heyel yang dimaksud dengan kuantitas adalah: "Hal-hal yang menunjukkan jumlah kerja dan keseimbangan hasil kerja yang dilaksanakan periode waktu tertentu"(1987:101). Dengan demikian kuantitas pelaksanaan program mengacu pada banyaknya hasil yang dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan sekaligus menunjukkan kecepatan pekerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1.4.2.3 Efektivitas Waktu (Y3)

Efektivitas waktu merupakan sesuatu yang dapat diperkirakan dan ditentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program. Menurut Johny Setiawan yang dimaksud efektivitas waktu adalah :

"Tidak seluruh waktu yang dialokasikan digunakan. Dalam arti bahwa pekerjaan tertentu dapat diselesaikan lebih cepat dari jatah waktu yang ditetapkan, juga bahkan batas waktu yang ditetapkan benar-benar ditarik yang berarti program diselesaikan tepat pada waktunya"(1989: 16).

1.4.3 Teori yang Menghubungkan Antara Pengaruh Pengawasan Langsung Camat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa

Pada uraian sebelumnya penulis telah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sangat dibutuhkan tindakan pengawasan. Alasan yang mendasar dari pemikiran ini adalah sifat dasar yang melekat pada diri manusia yang tidak pernah lepas dari kekhilafan dan kekeliruan. Apabila sifat tersebut dibiarkan akan tumbuh dan berkembang maka menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya menghambat tercapainya efektivitas pekerjaan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan tugas yang dapat merugikan maka pengawasan sangat dibutuhkan.

Pengawasan ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan pelaksana tugas pekerjaan, tetapi untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian pengawasan bukan merupakan suatu akhir dari kegiatan tetapi merupakan alat untuk menghindari dan mengatasi penyimpangan yang terjadi. Berkaitan dengan ini Soejamto berpendapat sebagai berikut:

"Tujuan diadakan pengawasan untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang"(1987: 83).

Agar penyimpangan benar-benar terhindari dan teratasi sehingga dapat tercipta pelaksanaan tugas yang baik, maka pengawasan harus ditujukan kepada pelaksana pekerjaan (bawahan) yang sedang melaksanakan tugasnya. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan bawahan (pelaksana pekerjaan) dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga bawahan dapat menjalankan tugasnya lebih efektif. Selanjutnya Prof.Dr.H. Hadari Nawawi berpendapat sebagai berikut:

"Fungsi pengawasan adalah bertujuan untuk mendukung kelancaran, ketepatan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pengawasan merupakan dukungan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas secara efektif"(1988: 7).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pekerjaan. Demikian halnya dengan pengawasan Camat dalam penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara dan merupakan suatu rumusan yang menyatakan harapan dari penulis tentang hubungan dua variabel dimana akan memberikan suatu kepastian terhadap dasar pemikiran yang

Pengawasan ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan pelaksana tugas pekerjaan, tetapi untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian pengawasan bukan merupakan suatu akhir dari kegiatan tetapi merupakan alat untuk menghindari dan mengatasi penyimpangan yang terjadi. Berkaitan dengan ini Soejamto berpendapat sebagai berikut:

"Tujuan diadakan pengawasan untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang"(1987: 83).

Agar penyimpangan benar-benar terhindari dan teratasi sehingga dapat tercipta pelaksanaan tugas yang baik, maka pengawasan harus ditujukan kepada pelaksana pekerjaan (bawahan) yang sedang melaksanakan tugasnya. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan bawahan (pelaksana pekerjaan) dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga bawahan dapat menjalankan tugasnya lebih efektif. Selanjutnya Prof.Dr.H. Hadari Nawawi berpendapat sebagai berikut:

"Fungsi pengawasan adalah bertujuan untuk mendukung kelancaran, ketepatan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pengawasan merupakan dukungan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas secara efektif"(1988: 7).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pekerjaan. Demikian halnya dengan pengawasan Camat dalam penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara dan merupakan suatu rumusan yang menyatakan harapan dari penulis tentang hubungan dua variabel dimana akan memberikan suatu kepastian terhadap dasar pemikiran yang

telah dituangkan dalam hubungan tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pendapat Winarno Surachmad yaitu :

"Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan ini belum final dan harus dibuktikan kebenarannya. Jelasnya hipotesis merupakan jawaban dugaan yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar"(1990:39).

Adapun kriteria-kriteria dari hipotesis menurut Moeljarto Tjokrowinoto adalah sebagai berikut :

1. Harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih.
2. Haruslah memungkinkan pengukuran atau pembuktian empiris.
3. Secara konseptual harus jelas dan ini tergantung, pada jelas tidaknya teori yang digunakan.
4. Tujuan harus cukup spesifik sehingga bisa dibuktikan kebenarannya" (1991:40).

Selanjutnya kegunaan hipotesis dalam suatu penelitian menurut Koentjoroningrat adalah :

1. Memberikan tujuan yang jelas bagi penelitian.
2. Membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh dalam pembahasan ruang lingkup penelitian dalam memilih fakta-fakta yang menjadi pokok perhatian dan dengan menentukan faktor-faktor yang relevan.
3. Menghindari suatu penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan mengumpulkan data yang tidak berhubungan dengan masalah yang diteliti" (1993:24).

Berdasarkan pendapat di atas, maka sesuai dengan perumusan masalah yang ada, penulis dalam hal ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh antara pengawasan Camat terhadap efektifitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

Hi : Ada pengaruh antara pengawasan Camat terhadap efektifitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penuntun bagi peneliti dalam melakukan pengujian, karena merupakan petunjuk dalam mengukur variabel. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi menyatakan definisi operasional adalah :

"Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut ia akan mengetahui bagaimana cara pengukuran atas variabel yang dilakukan"(1989:45).

Proses operasionalisasi meliputi beberapa tahap tergantung pada variabel yang sedang kita teliti, maka kegiatan operasionalisasi dalam penelitian ini meliputi suatu tahap indikator yang diturunkan menjadi item-item.

Dalam penelitian skripsi ini yang perlu dioperasionalisasikan adalah :

1. Operasionalisasi variabel pengaruh/independen yaitu pengawasan langsung oleh Camat (X).
2. Operasionalisasi variabel terpengaruh/dependen yaitu efektifitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Y).

1.6.1 Operasionalisasi Variabel Pengaruh Pengawasan Langsung Camat (X)

Pengawasan langsung dilakukan oleh Camat terhadap anggota LKMD sebagai pengelola maupun pelaksana Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar.

Berkenaan dengan pengawasan langsung Soejamto mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek yang diawasi, pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung, pemeriksaan di tempat"(1987:41).

Dari definisi diatas dapat ditarik indikator sebagai berikut :

1. Inspeksi Langsung (X1)
2. Pemeriksaan di tempat(X2)

1.6.1.1 Inspeksi Langsung (X1)

Inspeksi langsung merupakan salah satu perwujudan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan di tempat memberi petunjuk-petunjuk dan mengambil tindakan korektif untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana.

Berhubungan dengan ini Soejamto mengemukakan definisi tentang inspeksi langsung yaitu :

"Inspeksi langsung adalah tindakan kegiatan manager atau pimpinan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan di tempat (on the spot), dimana bila perlu memberikan petunjuk-petunjuk pada pelaksana dan juga mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar pekerjaan berjalan dan memperoleh hasil sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan"(1996:167).

Untuk mengukur indikator inspeksi langsung yang dilakukan oleh Camat dapat diukur dengan item-item sebagai berikut :

1. Aktivitas Camat melihat langsung ditempat pelaksanaan kegiatan
2. Aktivitas Camat dalam memberi petunjuk-petunjuk kepada pelaksana kegiatan
3. Aktivitas Camat dalam mengambil tindakan korektif terhadap pelaksana pekerjaan.

1.6.1.2 Pemeriksaan di Tempat (X2)

Pemeriksaan di tempat merupakan bentuk pengawasan langsung, dimana menurut Soejamto adalah sebagai berikut :

"Pemeriksaan di tempat adalah salah satu cara atau bentuk pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara mengamati, menyelidiki atau mempelajari secara cermat dan sistematis serta menilai dan menguji kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan dan segala dokumen atau keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan menerangkan hasilnya dalam berita acara pemeriksaan(BAP)"(1996:173).

Untuk mengukur indikator Pemeriksaan di tempat yang dilakukan oleh Camat dapat dilihat dari item-item sebagai berikut :

1. Aktivitas Camat dalam mengamati dan menyelidiki secara cermat dan sistematis pelaksanaan kegiatan terhadap obyek yang diperiksa
2. Aktivitas Camat dalam menguji dan menilai kebenaran pelaksanaan pekerjaan
3. Aktivitas Camat dalam membuat berita acara pemeriksaan tentang pelaksanaan pekerjaan

1.6.2 Operasionalisasi Variabel Terpengaruh Efektifitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Y)

Dalam pengukuran efektivitas penulis mengukur dari kualitas, kuantitas dan efektivitas waktu dalam pelaksanaan program Inpres. Sehingga operasionalisasi efektivitas kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.6.2.1 Kualitas Pelaksanaan Program (Y1)

Kualitas kerja adalah sejauhmana mutu kerja seseorang dalam menjalankan tugasnya yang meliputi ketepatan, kelengkapan serta kerapian. Untuk mengukur kualitas kerja dapat digunakan item-item sebagai berikut :

1. Aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan atas ketepatan kerjanya.
2. Aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan atas kelengkapan kerjanya.
3. Aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan atas kerapian kerjanya.

1.6.2.2 Kuantitas Pelaksanan Program (Y2)

Kuantitas kerja mengandung pengertian bahwa jumlah kerja yang dihasilkan pada periode waktu tertentu dan ketepatan seseorang dalam memenuhi tugasnya. Untuk mengukur kuantitas kerja digunakan item-item sebagai berikut :

1. Jumlah program Inpres yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Keseimbangan antara hasil pelaksanaan program yang diselesaikan atas kecepatan waktu yang dipergunakan.

1.6.2.3 Efektivitas Waktu (Y3)

Efektifitas waktu adalah suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya atau bahkan pekerjaan itu dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Efektivitas waktu dapat diukur dengan menggunakan item-item sebagai berikut :

1. Aktifitas pelaksanaan program dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

2. Aktifitas penggunaan waktu yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan program Inpres.
3. Aktifitas pelaksanaan program Inpres dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Setelah penulis membuat definisi operasional dari masing-masing penelitian, maka untuk langkah selanjutnya penulis akan menentukan skor dan standart pengukuran terhadap item-item atau pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Setiap pertanyaan dalam kuesioner yang penulis ajukan kepada responden terdapat dua alternatif jawaban yaitu :

1. Apabila responden menjawab ya, maka diberi nilai 2 (dua).
2. Apabila responden menjawab tidak, maka diberi nilai 1 (satu).

Selanjutnya untuk memberikan kriteria penilaian dari masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

1. Variabel Pengawasan Langsung (X)

Untuk variabel pengawasan langsung (X) yang terdiri dari X1, X2 mempunyai jumlah item keseluruhan 6, sehingga nilai terendah 6 sedangkan nilai tertinggi 12. Berdasar hal tersebut maka variabel pengawasan Camat dapat dikriteriakan sebagai berikut :

1. Apabila total nilai jawaban responden berkisar antara 6 - 9 maka kriterianya adalah pengawasan rendah.
2. Apabila total nilai jawaban responden berkisar antara 10 - 12 maka kriterianya adalah pengawasan tinggi.

2. Variabel Efektifitas Pelaksanaan Program (Y)

Untuk variabel efektifitas pelaksanaan Inpres (Y) yang terdiri dari Y1, Y2 dan Y3 mempunyai jumlah item keseluruhan 8, sehingga nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 16. Dengan demikian variabel efektifitas pelaksanaan Inpres ini dapat dikriteriakan sebagai berikut :

1. Apabila total nilai jawaban responden berkisar antara 8-12 maka kriterianya adalah efektifitas rendah.
2. Apabila total nilai jawaban responden berkisar antara 13-16 maka kriterianya adalah efektifitas tinggi.

1.7 Metode Penelitian

Setiap penelitian harus menggunakan metode yang benar untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengamatan. Metode penelitian mencakup metode teknik, prosedur pengumpulan data, pengujian dan pembuatan konklusi. Metode dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Hasil dari sebuah penelitian dapat diterima secara ilmiah apabila ia menggunakan metode penelitian yang dapat diterima secara ilmiah dan benar. Dalam kaitannya dengan ini, Koentjoroningrat mengatakan bahwa :

"Metode (Yunani :Methodos) adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu bersangkutan"(1985:16).

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode penelitian (Metode Research) adalah sebagai berikut :

"Metode research sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya" (1984:84).

Berdasarkan pengertian di atas, dalam penulisan ilmiah peneliti harus melakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan penelitian yang ada sehingga hasil yang diperoleh merupakan implikasi yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun cara-cara ini tidak lain adalah dengan metode penelitian.

Dari pengertian di atas maka penulis menggunakan metode penelitian dengan urutan sebagai berikut :

1. Penentuan populasi.
2. Penentuan sampel.
3. Pengumpulan data.
4. Analisa data.

1.7.1 Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari individu yang hendak dikenal penelitian. Sehubungan dengan populasi ini Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi

mengatakan bahwa : "Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga". (1987:108).

Berdasar pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota LKMD dimana setiap desa sama yaitu berjumlah 15 orang, sehingga sesuai dengan jumlah desa yang diteliti sebanyak 6 desa maka populasi secara keseluruhan adalah 90 orang.

1.7.2 Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Besar kecilnya sampel tidak ada ketentuan yang pasti, yang penting dirasa cukup mewakili populasi. Seperti yang dikatakan Sutrisno Hadi bahwa :

"Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak berapa persen suatu sampel yang harus diambil dari populasi. Ketidakadaan ketepatan mutlak itu tidak perlu menimbulkan keraguan pada seorang peneliti"(1984:43).

Dalam penelitian ini populasi tersebar di enam desa, sehingga penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara proporsional random sampling. Berkenaan dengan teknik pengambilan sampel ini Kartini Kartono mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Proporsional Random Sampling adalah cara pengambilan sampel secara random tanpa pandang bulu. Didalam random sampling ini anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel"(1987:23).

Berdasarkan pendapat diatas yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terbagi dalam enam desa, karena jumlah sub populasi masing-masing desa sama 15 orang (anggota LKMD) maka proporsi sampel setiap desa sama yaitu 5 orang anggota LKMD. Adapun susunan sampel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III. Jumlah populasi dan sampel

No.	Desa	Populasi (anggota LKMD)	Sampel
1	Ringinanom	15	$\frac{15 \times 30}{90} = 5$
2	Mangunan	15	$\frac{15 \times 30}{90} = 5$
3	Sukorejo	15	$\frac{15 \times 30}{90} = 5$
4	Sumbersari	15	$\frac{15 \times 30}{90} = 5$
5	Karanggodang	15	$\frac{15 \times 30}{90} = 5$
6	Slemanan	15	$\frac{15 \times 30}{90} = 5$
		Jumlah	30

Sumber : Struktur anggota LKMD tiap desa

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dalam penelitian, pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan teknik yang meliputi :

1. Teknik observasi.
2. Teknik dokumentasi.
3. Teknik kuesioner.
4. Teknik interview.

1.7.3.1 Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan berusaha melihat dan mengamati gejala atau kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan observasi Sutrisno Hadi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung"(1989:36).

1.7.3.2 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengambil data yang tersedia dilokasi penelitian, yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung data primer. Berkaitan dengan teknik dokumentasi menurut Winarno Surachmat yaitu :

"Dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan serta meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut"(1985:134).

Dalam kaitanya dengan konsep diatas penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, notulen rapat dan lain-lain.

1.7.3.3 Teknik Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan memberikan daftar pertanyaan tertulis secara langsung kepada responden untuk dimintai keterangan atau jawaban. Adapun jawaban pertanyaan bersifat tertutup dan telah disediakan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia.

1.7.3.4 Teknik Interview

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data-data lisan terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.7.4 Metode Analisa Data

Sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menguji kebenaran hipotesis maka seorang peneliti harus mengadakan analisa dan interpretasi data. Pada dasarnya ada dua metode yang

dilakukan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjoroningrat sebagai berikut :

"Sesungguhnya analisa ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan itu tergantung sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti"(1988:26).

Adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif adalah sebagai berikut :

1. Analisa kualitatif, digunakan apabila data yang dikumpulkan sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun secara struktur kuantitatif.
2. Analisa kuantitatif, digunakan bila data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori.

Selubungan dengan analisa data Sotyan Effendi dan Chris Manning mengemukakan bahwa:

"Tujuan analisa data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan dalam proses ini sering kali digunakan statistik, karena memang salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan data"(1986:213).

Berdasar pendapat diatas maka sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan maka penulis menggunakan analisa kuantitatif yang mempunyai ciri menggunakan data-data dengan angka. Untuk menguji hipotesis digunakan teknik analisa Chi Kuadrat seperti yang dinyatakan Sidney Siegel sebagai berikut:

1. Bila $N > 40$, gunakanlah X^2 dengan koreksi kontinuitas
 2. Bila N ada diantara 20 dan 40, test X^2 dengan koreksi kontinuitas boleh dipakai jika semua f_h adalah 5 atau lebih. Jika f_h kurang dari 5 pakailah Test Fisher.
 3. Bila $N < 20$ gunakanlah Test Fisher untuk kasus apapun.
- (Sidney Siegel, 1994:137)

Dalam penelitian ini data diambil dari 30 orang responden yang diambil secara proporsional random sampling. Mengingat jumlah sample hanya terdiri dari 40 orang maka analisis Chi Kuadrat yang dipakai adalah analisis Chi Kuadrat untuk sample antara 20 - 40 sebagaimana persyaratan yang dikemukakan oleh Sidney Siegel diatas.

Adapun rumus yang dipakai adalah :

$$X^2 = \frac{N(|AD - BC|)^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)}$$

Keterangan :

X^2 = Chi Kuadrat

ABCD = Frekuensi Observasi

N = Jumlah Sampel / Kasus

Langkah selanjutnya adalah pengajuan taraf kepercayaan dengan batas keabsahan 0,05 atau 5%.

Ho diterima apabila $X^2 \leq X^2$ tabel

Ho ditolak apabila $X^2 \geq X^2$ tabel

BAB II
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar

Deskripsi daerah penelitian adalah suatu gambaran tentang lokasi daerah yang menjadi sasaran atau obyek penelitian. Daerah penelitian yang dimaksud deskripsi daerah penelitian adalah gambaran umum desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar.

Untuk memperjelas berikut penulis sajikan gambaran umum Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar.

2.2 Keadaan Alam

Kecamatan Udanawu adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar dan terletak disebelah barat daya Kabupaten Blitar. Sebelah utara Kecamatan Udanawu berbatasan dengan Kecamatan Kandat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Srengat dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonodadi.

Secara keseluruhan Kecamatan Udanawu mempunyai luas wilayah 5247 ha, dengan ketinggian rata-rata 151 m diatas permukaan laut dan daerahnya terdiri dari tanah dataran.

Kecamatan Udanawu terdiri dari 12 desa dan berdasarkan Tipologi Desa tahun 1997/1998 adalah sebagai berikut :

No.	Desa	Tipologi
1	Ringinanom	Swasembada
2	Karanggondang	Swakarsa
3	Mangunan	Swasembada
4	Sukorejo	Swadaya
5	Sumbersari	Swadaya
6	Slemanan	Swakarsa
7	Bendorejo	Swasembada
8	Bakung	Swasembada
9	Tunjung	Swakarsa
10	Temenggungan	Swadaya
11	Besuki	Swadaya
12	Jati	Swadaya

Sumber : Bangdes Tahun 1997/1998

Dari kedua belas desa tersebut, penulis meneliti enam desa yaitu 2 desa swakarsa, 2 desa swadaya dan 2 desa swasembada. Keenam desa tersebut adalah :

No.	Desa	Tipologi
1	Karanggondang	Swakarsa
2	Slemanan	Swakarsa
3	Sukorejo	Swadaya
4	Sumbersari	Swadaya
5	Ringinanom	Swasembada
6	Mangunan	Swasembada

Sumber : Bangdes Tahun 1997/1998

Dengan pertimbangan dari enam desa sampel tersebut sudah cukup mewakili keadaan dan pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Udanawu.

Setelah diadakan survei di desa sampel, dapat diperoleh data letak geografis dari masing-masing desa sampel sebagai berikut :

Tabel IV
Tabel Batas-batas Desa

Desa sampel	Batas			
	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	2	3	4	5
Ringinanom	Karanggondang	Langon	Dermojoyan	Tawangrejo
Mangunan	Bakung	Sumbersari	Karanggondang	Kebonagung
Sukorejo	Slemanan	Ringinanom	Sumbersari	Bakung
Sumbersari	Sukorejo	Kedungduren	Dadaplangu	Karanggondang
Karanggondang	Mangunan	Sumbersari	Ringinanom	Kebonagung
Slemanan	Ringinrejo	Ringinanyar	Sukorejo	Bakung

Sumber: Monografi masing-masing desa

Ditinjau dari segi orbitasi, karena setiap desa berlokasi tidak sama maka memiliki jarak yang berbeda pula, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel V
Tabel Orbitasi Desa Sampel

Desa sampel	Jarak ke(Km)		
	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
1	2	3	4
Ringinanom	4	16	150
Mangunan	1	19	147
Sukorejo	1	22	146
Sumbersari	3	18	146
Karanggondang	2,5	18	148
Slemanan	2	23	164

Sumber : Monografi masing-masing desa

Selanjutnya ditinjau dari segi luas wilayah dari masing-masing desa sampel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI
Luas Wilayah Desa Sampel Menurut Peruntukan

Peruntukan	Ringinanom	Mangunan	Sukorejo	Sumbersari	Karanggondang	Slemanan
1	2	3	4	5	6	7
Jalan	24,350	6,05	10,00		12,00	
Sawah dan ladang	173,79	222,000	221,095	245,750	235,820	230,543
Bangunan Umum	4	0,770	1,200		0,340	
Kas desa	106,5	94,400	208,180		80,000	
Pekuburan	0,650	0,360	0,830	1,500	0,350	0,935

Sumber: Monografi masing-masing desa

2.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk secara keseluruhan yang tinggal di Kecamatan Udanawu adalah sebagai berikut:

Laki-laki	: 18.960 jiwa
Perempuan	: 18.393 jiwa
Jumlah	: 37.353 jiwa

Adapun jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin di enam desa sampel adalah sebagai berikut:

Tabel VII
Jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin
Tahun 1997/1998

No	Desa sampel	Golongan umur			Jenis kelamin		Jumlah
		0-15 th	16-60 th	61- keatas	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ringianom	1492	3056	529	2555	2522	5077
2	Mangunan	737	1495	255	1293	1194	2487
3	Sukorejo	1445	2988	548	2551	2430	4981
4	Sumbersari	805	1665	305	1417	1358	2775
5	Karanggondang	648	1339	245	1149	1083	2232
6	Slemanan	1081	2237	409	1891	1836	3727

Ditinjau dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk petani dan seiebihnya swasta, PNS, dagang, dan tukang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VIII
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian	Ringianom	Mangunan	Sukorejo	Sumbersari	Karanggondang	Slemanan
1	2	3	4	5	6	7
Tani	2520	1579	2232	1509	715	1807
Dagang	6	29	19	7	12	16
Pensiunan	12	7	4	2	3	2
ABRI	3	1	1	-	2	-
PNS	52	34	80	9	31	43
Swasta	1215	176	417	147	230	242
Tukang	132	54	64	23	27	23
Jumlah	3940	1880	2817	1697	1020	2133

Sumber: Monografi masing-masing desa

Ditinjau dari segi religi, masyarakat wilayah Kecamatan Udanawu sebagian besar adalah pemeluk agama Islam dan seiebihnya adalah Katolik, Protestan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IX
Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 1997 / 1998

No	Golongan	Desa Sampel					
	Agama	Ringianom	Mangunan	Sukorejo	Sumbersari	Karanggondang	Slemanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Islam	4967	2407	4901	2715	2203	3607
2	Kristen	13	7	4	3	5	3
3	Katholik	96	73	76	57	24	27
4	Kepercayaan	-	-				
	Jumlah	3940	1880	2817	1697	1020	2133

Sumber : Monografi desa masing-masing

Ditinjau dari segi pendidikan sebagian besar tamatan SD dan jumlah penduduk semakin sedikit yang meneruskan sekolah ke jenjang Yang lebih tinggi.

Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel X
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 1997/1998

No	Tingkat	Desa Sampel					
	Pendidikan	Ringianom	Mangunan	Sukorejo	Sumbersari	Karanggondang	Sleman
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tamat SD	2177	1827	2057	1758	1697	1901
2	Tamat SMP	1498	290	789	269	114	681
3	Tamat SMA	350	155	338	149	96	221
4	Tamat Akademik/ Diploma	41	25	37	19	14	32
5	Perguruan Tinggi	11	6	8	6	3	10
	Jumlah	4077	2303	3905	2200	2024	2845

Sumber : Monografi masing-masing desa

2.4 Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana desa merupakan suatu alat untuk mempermudah kegiatan masyarakat, sehingga kelengkapan / tersedianya sarana tersebut sangat diperlukan. Berikut sarana dan prasarana desa sampel wilayah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam bentuk tabel:

Tabel XI
Jumlah Peribadatan dan Pendidikan Tahun 1997/1998

No	Jenis Prasarana	Desa Sampel					
		Ringianom	Mangunan	Sukorejo	Sumbersari	Karanggondang	Slemanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mushola	6	7	5	5	6	6
2	Masjid	3	2	3	2	2	3
3	TK	1	1	1	-	1	1
4	SD	3	3	3	3	3	3
5	SMP	-	1	-	-	-	-
6	Pondok pesantren	1	-	1	-	-	1

Sumber: Monografi masing-masing desa

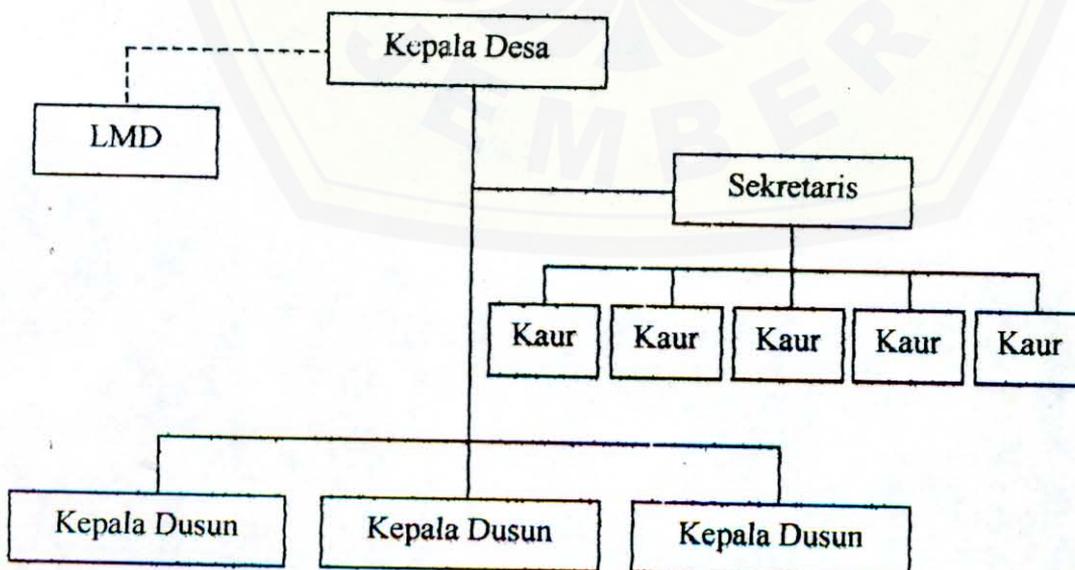
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana desa yaitu prasarana pendidikan dan peribadatan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, juga memperoleh pendidikan yang lebih luas karena sekolah-sekolah yang ada mampu menampung anak-anak usia sekolah.

2.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Dalam melengkapi data untuk menjelaskan gambaran desa penelitian, maka penulis siapkan struktur organisasi pemerintahan desa di 6 desa beserta beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas masing-masing bagian seperti berikut ini :

2.5.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa

Dengan adanya bagan struktur pemerintahan desa ini diharapkan tidak adanya kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas pekerjaan dari masing-masing anggotanya. Sehingga dapat memperlancar jalannya pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan pada Peraturan Mendagri No. 2 Tahun 1984 dan Instruksi Gubernur Jawa Timur No. 23 Tahun 1984 maka bentuk bagan struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut :



Dengan melihat struktur pemerintahan desa di atas alat kelengkapan yang digunakan didalam menjalankan pemerintahan desa adalah :

1. Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
2. Kepala Desa.
3. Sekretaris Desa.
4. Kepala Dusun.
5. Kepala Urusan.

Keterangan :

1. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Lembaga Musyawarah Desa adalah merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila di desa, dengan berdasarkan musyawarah atau mufakat yang bertujuan untuk menetapkan keputusan-keputusan tentang hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama daripada musyawarah desa. Disamping itu merupakan sarana komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah didalam meningkatkan partisipasi aktif dan sukarela dari masyarakat desa terhadap masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan.

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah sebagai pemimpin formal yang mempunyai kekuasaan tertinggi di desa, keputusan-keputusan mengenai aktivitas desa berada ditangan Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat desa. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab moral dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa, sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk memimpin wilayahnya Kepala Desa melindungi warganya, mengayomi dan memberikan rasa aman, sehingga disamping sebagai pemimpin formal juga sebagai tokoh panutan warga masyarakat desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staff pembantu Kepala Desa dalam memimpin masyarakat desa. Tugas sekretaris desa melaksanakan

administrasi desa, pembangunan pemerintahan serta melayani administrasi bagi Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
 2. Melaksanakan urusan keuangan.
 3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 4. Melaksanakan tugas-tugas fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan.
4. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam ruang lingkup dusun. Untuk menjalankan tugas Kepala Dusun mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
 2. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya.
 3. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.
5. Kepala Urusan

Kepala Urusan mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. Adapun Kepala Urusan yang ada saat ini diantaranya yaitu Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum. Adapun tugas dari Kepala Urusan antara lain adalah sebagai berikut :

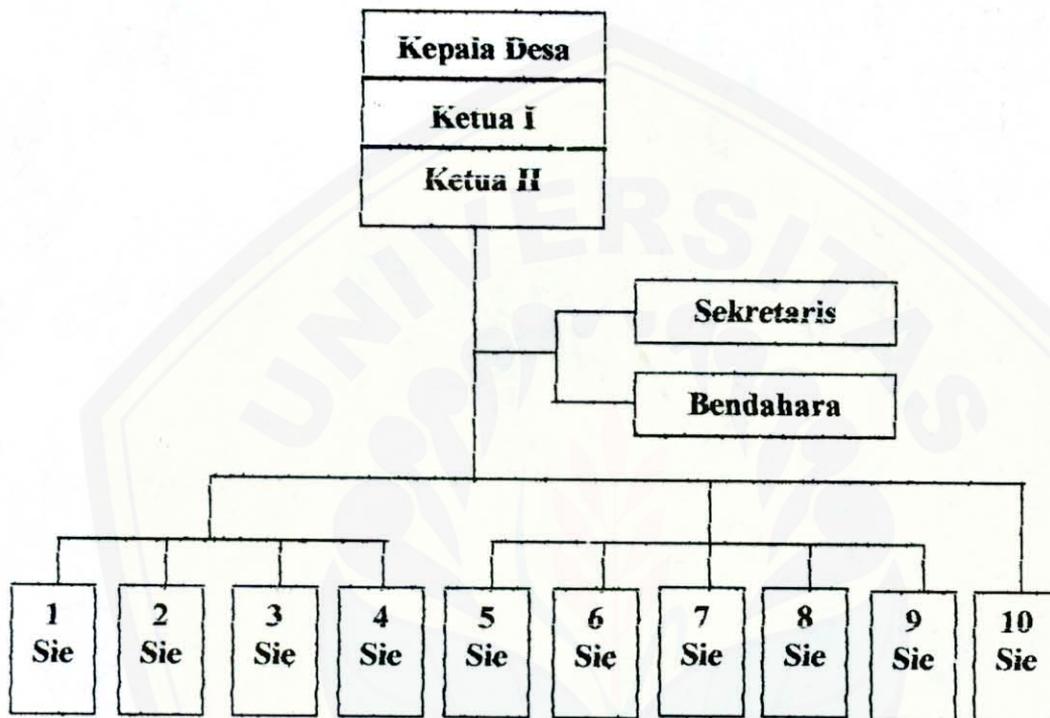
1. Melaksanakan kegiatan pembangunan, kesejahteraan, keuangan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
2. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

2.5.2 Bagan Struktur Organisasi LKMD

LKMD merupakan suatu lembaga yang merupakan penyempurnaan dari LSD, dimana LKMD disini mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. LKMD diartikan sebagai organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan masyarakat desa dalam bidang

pembangunan, dengan prinsip dari dan oleh masyarakat untuk menampung semua aspirasi dan inovatif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. (Susunan Tata Kerja LKMD, 1980).

Dengan demikian dapat diidentifikasi secara umum adalah suatu sistem tata kerja sama yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, maka dengan demikian struktur organisasi LKMD adalah seperti dibawah ini :



Keterangan:

Ketua Umum melakukan koordinasi seksi 1-4

Ketua I melakukan koordinasi seksi 5-9

Ketua II melakukan koordinasi seksi 10

1. Seksi Agama
2. Seksi Pembudayaan P4
3. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. Seksi Pendidikan dan Penerangan
5. Seksi Lingkungan Hidup
6. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi
7. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana

8. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesehatan
9. Seksi Kesejahteraan Sosial
10. Seksi PKK

2.5.3 Tugas dan Fungsi LKMD

Tugas dan fungsi LKMD adalah membantu Kepala Desa / Lurah di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa.

Dengan demikian tugas dan fungsi LKMD di desa adalah:

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri.
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
4. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
5. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
6. Membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantab (Susunan Tata Kerja LKMD, 1980).

2.5.3 Mekanisme Perencanaan dari Bawah

Perencanaan pembangunan desa harus disusun berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka LKMD sebagai lembaga yang menangani masalah pembangunan mengadakan suatu penelitian terhadap masyarakat secara terpisah. Kegiatan penelitian tersebut meliputi analisa terhadap perubahan situasi, studi kelayakan kemudian dilanjutkan

pada penyusunan perencanaan. Sistem perencanaan yang disusun berdasar masyarakat sendiri dikenal dengan istilah *bottom up planning*.

Perencanaan atau usulan dalam rangka pembangunan di tingkat desa disusun oleh LKMD dengan bimbingan Camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan. Hasilnya dituangkan dalam suatu rencana atau usulan proyek dari kecamatan yang bersangkutan dalam rangka pembangunan wilayah kecamatan. Kemudian diusulkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah kemudian dikelola Ketua Bappeda Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kodya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Desa Tingkat II (Rakorbangdes Tingkat II). Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman pada Repelita Daerah Tingkat II dituangkan dalam satu rencana atau usulan proyek Kabupaten untuk diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh Ketua Bappeda Tingkat I dan Direktorat Pembangunan Desa Propinsi membahas usulan proyek Kabupaten/Kodya dalam suatu Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Desa Tingkat I (Rakorbangdes Tingkat I). Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman pada Repelita Daerah Tingkat I dituangkan dalam suatu rencana/usulan proyek dari Propinsi Daerah Tingkat I selanjutnya diadakan penyempurnaan dengan pengembangan wilayah dalam forum konsultasi Bappeda, untuk selanjutnya diajukan kepada Bappeda, Bappenas dan Departemen Dalam Negeri.

Setelah melalui proses yang panjang mulai dari tingkat desa sampai propinsi dan telah di Bappenas maka akan menjadi suatu rencana pembangunan nasional yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan baik yang berasal APBN maupun APBD atau yang berasal dari swadaya masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa setelah menerima daftar perincian anggaran sektoral yang masuk ke desa, maka Kepala Desa mengadakan rapat dengan LKMD dan LMD guna mengambil langkah-langkah didalam pelaksanaan dengan bimbingan dan petunjuk dari Camat/Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan. Kemudian dalam pelaksanaannya,

proyek/program di tingkat desa LKMD berperan sebagai penggerak dan pelaksana sesuai dengan fungsi LKMD.

Pengolahan dana pembangunan di tingkat desa baik yang berasal dari swadaya masyarakat maupun dari pemerintah maka dana yang berasal dari masyarakat disalurkan melalui LMD/LKMD untuk diteruskan ke Rembug desa. LKMD dalam mengelola dana pembangunan desa, biaya yang dibutuhkan diambil dari kas desa dengan tanda bukti kuitansi yang biasanya berupa dana awal maupun dana keseluruhan (uang yang dipertanggungjawabkan). Setelah mendapatkan dana yang dibutuhkan LKMD membentuk tim terpadu untuk melaksanakan pembangunan fisik/non fisik yang diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek. Dalam hal ini masyarakat tentu saja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa dengan partisipasi baik berupa material, uang maupu tenaga.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di beberapa desa wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar dengan judul "Pengaruh Pengawasan Langsung Camat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa" dan setelah penulis menyajikan data, menganalisa data serta mengajukan hipotesis terhadap variabel yang tercakup dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasar analisa Statistik Chi Kuadrat (X^2) terbukti bahwa ada pengaruh pengawasan langsung oleh Camat terhadap efektivitas pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari hasil (X^2) hitung yaitu 4,34 yang lebih besar (X^2) tabel yaitu 3,84 dengan db = 1 dengan taraf signifikan 5% (0,05) [MeMeXI] yang berarti Hipotesis Kerja (H_a) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa : **"Ada Pengaruh Pengawasan Langsung oleh Camat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar"**.
2. Dengan demikian pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat.

5.2 Saran

Berdasar hasil penelitian yang penulis lakukan serta mengacu pada kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan supaya efektivitas pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa tercapai lebih tinggi.

2. Demikian juga anggota LKMD di wilayah Kecamatan Udanawu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar lebih meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A LOEDIN, 1985, **Pengetahuan Dasar Penelitian Statistik**, Airlangga Press, Surabaya.
- Anonim, 1991, **Pedoman Peningkatan Pengawasan Melekat**, CV Kloeng Kloede Jaya, Jakarta.
- Anonim, 1984, **Intruksi Presiden RI No.6 Tahun 1984**, Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
- Anonim, 1984, **Intruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1984**, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- Anonim, 1997, **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1997/1998**, di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar.
- Hadari Nawawi, 1988, **Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen**, Gunung Agung, Jakarta.
- Hidayat, 1986, **Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas serta Interpretasi Hasil Pengukurannya**, Prisma Volume 3 No. 11 November.
- Kunaryo, 1993, **Sejarah Perencanaan Pembangunan Dalam Prisma Edisi Khusus 25 Tahun**, LP3ES, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, **Pengantar Metodologi Riset**, Alumni, Bandung.
- Koentjoroningrat, 1991, **Metode-metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.
- Moeljarto Tjokroaminoto, 1987, **Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi**, PT Tiara Wahana, Yogyakarta.

- Sondang P. Siagian, 1993, **Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi**, CV. Haji Massagung, Jakarta.
- Soejamto Ir, 1986, **Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soewarno Handyaningrat, 1992, **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management**, CV. Haji Massagung.
- Sutrisno Hadi, 1989, **Metodologi Research I**, YPPF UGM, Yogyakarta
- Sidney Siegel, 1994, **Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial**, Gramedia, Jakarta.
- The Liang Gie, 1977, **Kamus Administrasi**, Gunung Agung, Jakarta
- Winarno Surachmat, 1985, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung.
- Soekarno K, 1985, **Dasar-Dasar Manajemen**, Aksara, Bandung
- Soejamto Ir, 1986, **Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan**, Graha Indonesia, Jakarta
- Paritra Westra, 1987, **Hubungan Kerja Kemanusiaan (Human Relations)**, Balai Pembinaan Administrasi, Yogyakarta.

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

I. Pengantar

Dalam rangka penyusunan skripsi ini sangat dibutuhkan adanya suatu penelitian, agar dapat diperoleh hasil yang berkualitas. Bersama ini kami mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Jember bermaksud mengadakan penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Langsung Camat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

Demi tercapainya tujuan tersebut maka penulis mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu kelancaran penelitian ini yaitu dengan menjawab daftar pertanyaan yang penulis sediakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan kerahasiaan jawaban akan penulis jaga.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan dan kerelaan Bapak/Ibu/Saudara yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi daftar pertanyaan ini. Dan tak lupa penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dihati Bapak/Ibu/Saudara.

Hormat kami,

Penulis

II. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Inpres

I. Kualitas Pelaksanaan Program Inpres

1. Apakah dalam pelaksanaan bantuan Inpres yang Bapak kerjakan selalu tepat mengenai sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah dalam setiap pelaksanaan bantuan Inpres yang Bapak kerjakan, selalu dapat terselesaikan (sampai finish)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah dalam setiap pelaksanaan bantuan Inpres, selalu dapat Bapak selesaikan dengan baik (rapi)?
 - a. Ya
 - b. Tidak

II. Kuantitas Pelaksanaan Program Inpres

1. Apakah semua pelaksanaan program bantuan Inpres, dapat Bapak selesaikan sesuai dengan jumlah/target berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah kecepatan waktu penyelesaian pelaksanaan bantuan Inpres dapat seimbang dengan hasil yang dicapai?
 - a. Ya
 - b. Tidak

III. Efektivitas Waktu

1. Apakah pelaksanaan bantuan Inpres dapat Bapak selesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah dalam pelaksanaan bantuan Inpres, Bapak selalu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah dalam pelaksanaan bantuan Inpres dapat Bapak selesaikan tepat pada waktunya?
 - a. Ya
 - b. Tidak



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 22723 Fax. (0331) 89029 Jember (68118)

Nomer : 9934^a /PT32.H9/MS'98

19 Desember 1998

Aspirasi : -

Perihal : Permohonan ijin mengadakan penelitian

Kepada : Yth, Sdr. Kakansospol
Pemda Daerah Tk.II Blitar
di -
B L I T A R .

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama : AGUS DODIK SUTRISNO / 9309103001
~~Dosen~~/Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Alamat : Rt.IV Rw.03 Ringinanom, Udanawa, Blitar
Judul penelitian : Pengaruh Pengawasan Casat Terhadap
Efektivitas Program Bantuan Pembangunan
Desa .
Di daerah : Kabupaten Blitar
Lamanya : 3 (tiga) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada ~~dosen~~/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul tersebut di atas.

Kemudian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Lia Kip, Su

L I A K I P, SU
130 531 976

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas TSSE

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan. Dr. Sutomo No. 25 Telepon. 81243
BLITAR

SURAT KETERANGAN

UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH

NOMOR : 072 / 142 / 423.330 / 19 98

Berdasarkan : Srt. UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENELITIAN NO. 9934 a/
: PT 32.H9 / N5'98 TANGGAL 19 DESEMBER 1998.
dengan ini menyatakan T I D A K K E B E R A T A N
dilakukan SURVEY/RESEARCH oleh :

Nama : AGUS DODIK SUTRISNO / 9309103091
Alamat : Rt.IV Rw.03 Ringinanom Kecamatan Udanawu
Jabatan : LMS. FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK JEMBER.
Thema/Acara Survey/Research : " PENGARUH PENGAWASAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA ".
Daerah/Tempat Survey/Research : KECAMATAN UDANAWU
Lamanya Survey/Research : Mulai tanggal 22 DESEMBER 1998 s/d 22 MARET 1999.
Pengikut Survey/Research : _____

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat (Muspika) setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah setempat.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan survey/research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Kantor Sosial Politik), mengenai hasil pelaksanaan Survey/research.
5. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata, bahwa pemegang SURAT Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

PEMUSAN : Kpd. Yth :

. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar
. Sdr. Kapolres B L I T A R
. Sdr. Ketua Bappeda II Kab.Blitar
. Sdr. Camat U d a n a w u

Blitar, 22 Desember 1998.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLITAR
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLITAR



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR

KECAMATAN UDANAWU

Jl. Kediri Nomor : 802 Telepon 551005

U D A N A W U

Udanawu, 25 Januari 1999

Nomor : 072/ ~~48~~ /423.047/1999
Sifat : Penting
Lampiran : -.-
Perihal : Melakukan SURVEY / RESEARCH

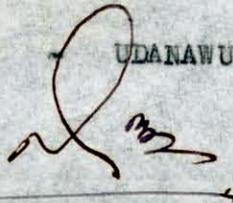
K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Desa se wil.
Kecamatan Udanawu

Menunjuk Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Kab Dati II Blitar Nomor : 072/142/423.330/1998 tanggal 22 Desember 1998 Maka bersama ini kepada Sdr. Kepala Desa , untuk membantu pelaksanaan SURVEY / RESEARCH yang dilaksanakan oleh Sdr. AGUS DODIK SUTRISNO / 9309103091 dengan alamat : Rt. IV Rv. 03 Ringinanom - Udanawu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jember, mulai tanggal- 22 Desember 1998 s/d 22 Maret 1999 .

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih atas kerjasamanya .



UDANAWU


Drs. DANURI

Penata Tk. I

NIP. 510 085 321